

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Terdapat beraneka macam pemaknaan tentang apa dan bagaimana pendidikan politik. Istilah pendidikan politik dalam Bahasa Inggris sering disamakan dengan istilah *political socialization*. Istilah *political socialization* jika diartikan secara harfiah ke dalam bahasa Indonesia akan bermakna sosialisasi politik. Oleh karena itu, dengan menggunakan istilah *political socialization* banyak yang mensinonimkan istilah pendidikan politik dengan istilah sosialisasi politik, karena keduanya memiliki makna yang hampir sama. Dengan kata lain, sosialisasi politik adalah pendidikan politik dalam arti sempit. Oleh karena itu dalam memberikan pengertian tentang pendidikan politik harus dijelaskan terlebih dahulu mengenai sosialisasi politik. Ramlan Surbakti berpendapat bahwa :

Sosialisasi politik dibagi dua yaitu pendidikan politik dan indoktrinasi politik. Pendidikan politik merupakan suatu proses dialogik diantara pemberi dan penerima pesan. Melalui proses ini para anggota masyarakat mengenal dan mempelajari nilai-nilai, norma-norma, dan simbol-simbol politik negaranya dari berbagai pihak dalam sistem politik seperti sekolah, pemerintah dan partai politik (Surbakti, 1999).

Pendapat di atas secara tersirat menyatakan bahwa pendidikan politik merupakan bagian dari sosialisasi politik. Pendidikan politik mengajarkan masyarakat untuk lebih mengenal sistem politik negaranya. Dapat dikatakan bahwa sosialisasi politik adalah proses pembentukan sikap dan orientasi politik para anggota masyarakat. Melalui proses sosialisasi politik inilah para anggota masyarakat memperoleh sikap dan orientasi terhadap kehidupan politik yang berlangsung dalam masyarakat.

Pendidikan politik adalah suatu bentuk pendidikan yang dijalankan secara terencana dan disengaja baik dalam bentuk formal maupun informal

yang mencoba untuk mengajarkan kepada setiap individu anggota masyarakat agar sikap dan perbuatannya dapat sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku secara sosial. Dalam hal ini dapat terlihat bahwa pendidikan politik tidak hanya mempelajari sikap dan tingkah laku individu. Namun pendidikan politik mencoba untuk mengaitkan sikap dan tingkah laku individu tersebut dengan stabilitas dan eksistensi sistem politik.

Pendidikan dapat dilihat sebagai faktor politik dan kekuatan politik. Sebab pendidikan dan sekolah pada hakekatnya juga merupakan pencerminan dari kekuatan-kekuatan sosial-politik yang tengah berkuasa, dan merupakan refleksi dari orde penguasa yang ada di eranya (Kartini Kartono, 1990).

Berdasarkan pendapat di atas, dapat kita ketahui bahwa pendidikan dan politik adalah dua unsur yang saling mempengaruhi. Pengembangan sistem pendidikan harus selalu berada dalam kerangka sistem politik yang sedang dijalankan oleh pemerintahan di masanya. Oleh karena itu segala permasalahan yang terjadi di dunia pendidikan akan berubah menjadi permasalahan politik pada saat pemerintah dilibatkan untuk memecahkannya.

Pengertian dari pendidikan politik yang lebih spesifik dapat diambil dari pendapatnya yang mengatakan bahwa :

pendidikan politik dapat diartikan sebagai usaha yang sadar untuk mengubah proses sosialisasi politik masyarakat sehingga mereka memahami dan menghayati betul nilai-nilai yang terkandung dalam sistem politik yang ideal yang hendak dibangun" (Alfian, 1981).

Dengan adanya pendidikan politik diharapkan setiap individu dapat mengenal dan memahami nilai-nilai ideal yang terkandung dalam sistem politik yang sedang diterapkan dan melalui pendidikan politik setiap individu tidak hanya sekedar tahu saja tapi juga lebih jauh dapat menjadi seorang warga negara yang memiliki kesadaran politik untuk mampu mengemban

tanggung jawab yang ditunjukkan dengan adanya perubahan sikap dan peningkatan kadar partisipasi dalam dunia politik.

Pendidikan politik merupakan upaya untuk meningkatkan pengetahuan politik rakyat dan agar mereka dapat berpartisipasi secara maksimal dalam sistem politiknya. Pendidikan politik perlu dilaksanakan secara berkesinambungan agar masyarakat dapat terus meningkatkan pemahamannya terhadap dunia politik yang selalu mengalami perkembangan. Pembelajaran pendidikan politik yang berkesinambungan diperlukan mengingat masalah-masalah di bidang politik sangat kompleks, multi dimensi, dan berubah-ubah dari suatu kurun waktu ke kurun waktu berikutnya (Rusadi Kartaprawira, 1988).

Pendidikan politik juga dapat diartikan sebagai proses yang berkaitan dengan pembentukan serangkaian : pemahaman warga negara tentang politik, pendapat warga negara tentang politik, keyakinan warga negara terhadap politik, dan sikap warga negara terhadap politik, dalam rangka membentuk perilaku dan/atau budaya politik warga negara sesuai dengan norma-norma politik yang diatur dalam konstitusi negara. Perilaku dan/atau budaya politik yang dimaksud, diantaranya dapat berupa perilaku politik sehari-hari dan kebiasaan warga negara dalam mentaati atau melanggar norma-norma perilaku politik yang diatur dalam konstitusi negara. Pembentukan perilaku dan/atau budaya politik sebagaimana yang dimaksud dalam norma-norma politik yang diatur dalam konstitusi negara dapat dilakukan melalui metode tidak langsung, seperti pelatihan dan sosialisasi politik, serta metode langsung seperti pembelajaran konsep, teori, dan praktek politik dan/atau pemberian contoh berperilaku dalam proses politik.

Secara umum, dalam negara dan/atau sistim pemerintahan yang menerapkan prinsip demokrasi, pendidikan politik yang diberikan kepada warga negara adalah diorientasikan untuk menumbuhkan : pemahaman politik, kesadaran politik, dan partisipasi politik warga negara dalam proses politik. Pendidikan politik yang dimaksud dapat dilakukan oleh : keluarga, sekolah, partai politik, media massa, lembaga pemerintahan, dan lembaga kemasyarakatan

lainnya. Di Indonesia, termasuk di Provinsi Jawa Timur, fenomena dan kejadian yang berkaitan dengan proses politik berubah dan/atau bergerak sangat dinamis, hal tersebut dapat kita cermati dari adanya perubahan mengenai : (1) peraturan perundangan tentang proses politik mengalami perubahan setiap menjelang pemilu, (2) teknis penyelenggaraan pemilu juga selalu mengalami perubahan, (3) jumlah partai politik selalu berubah, (4) lingkungan politik juga berubah terus, dan (5) pola perilaku politik juga mengalami perubahan. Perubahan seperti ini perlu dikomunikasikan atau disosialisasikan kepada publik melalui berbagai cara, diantaranya melalui penyelenggaraan pendidikan politik dalam rangka meningkatkan partisipasi politik, baik partisipasi secara langsung maupun tidak langsung.

Adanya beberapa warga negara Indonesia yang berperilaku politik kurang baik yang sering diberitakan oleh Media Massa, seperti: adanya warga negara yang tidak ikut memilih dalam suatu pemilihan umum, terjadinya bentrokan fisik antar anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), adanya anggota DPR yang malas menghadiri sidang, dan lain sebagainya adalah merupakan contoh perilaku politik yang tidak mendidik kepada para pemilih pemula. Mengingat pemilih pemula merupakan kelompok masyarakat yang jumlahnya cukup signifikan, dan relatif belum memiliki dan/atau kecil pengalamannya sebagai pelaku politik, maka pendidikan politik bagi kelompok ini menjadi sangat urgen.

Merujuk pada semua pengertian pendidikan politik yang disampaikan oleh beberapa ahli di atas, dapat diketahui bahwa yang dimaksud dengan pendidikan politik adalah suatu upaya sadar yang dilakukan antara pemerintah dan para anggota masyarakat secara terencana, sistematis, dan dialogis dalam rangka untuk mempelajari berbagai konsep, simbol, hal-hal dan norma-norma politik dari satu generasi ke generasi selanjutnya.

Pendidikan dan politik adalah dua elemen penting dalam sistem sosial politik di suatu negara, baik negara maju maupun negara berkembang. Keduanya bahu-membahu dalam proses pembentukan karakteristik

masyarakat di suatu negara. Lebih dari itu, keduanya satu sama lain saling menunjang dan saling mengisi. Lembaga-lembaga dan proses pendidikan berperan penting dalam membentuk perilaku politik masyarakat di suatu negara. Begitu juga sebaliknya, lembaga-lembaga dan proses politik di suatu negara membawa dampak besar pada karakteristik pendidikan yang ada di negara tersebut. Terdapat hubungan yang erat dan dinamis antara pendidikan dan politik di setiap negara. Hubungan tersebut adalah realitas empiris yang telah terjadi sejak awal perkembangan peradaban manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Memperhatikan penjelasan sebagaimana tersebut di depan dapat diketahui bahwa pendidikan politik memiliki kontribusi terhadap pemahaman anggota masyarakat tentang kehidupan politik yang sedang berlangsung di negaranya, dan karenanya dapat mempengaruhi tingkat partisipasi politik dalam semua dimensi. Dengan kata lain pendidikan politik mempengaruhi corak kehidupan demokrasi di suatu negara, dengan asumsi hipotetik bahwa makin baik pendidikan politik di suatu negara maka makin tinggi derajat partisipasi politik, dan selanjutnya makin tinggi derajat partisipasi politik maka makin baik kehidupan demokrasi pada negara tersebut.

Berangkat dari pola pikir tersebut di atas, lalu bagaimana dengan kehidupan demokrasi dan partisipasi politik di Indonesia pasca reformasi (yang konon menjadi masa kebangkitan kehidupan demokrasi di Indonesia). Pada pasca reformasi, sebagai wujud meningkatnya suhu demokrasi, tempat kedaulatan politik, yakni rakyat, makin dihargai. Pada kondisi demikian mestinya pelaksanaan pemilu makin mendapat sambutan yang antusias dari publik dengan ditandai optimalnya partisipasi publik mereka dalam seluruh proses politik termasuk dalam pesta demokrasi yang bernama pemilihan umum (pemilu), baik Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden maupun Pemilihan Kepala Daerah. Namun realitas menunjukkan hal terbalik. Sejak pelaksanaan pemilu

pertama pada era reformasi 1999 hingga Pemilu 2009, tingkat partisipasi publik dalam pemilu menunjukkan penurunan secara konsisten.

Tingkat partisipasi pada Pemilu 1999 sebesar 92,6 persen. Pada Pemilu 2004 tingkat partisipasi itu turun menjadi 84,1 persen, kemudian kembali anjlok pada Pemilu 2009 menjadi 70,9 persen (KPU Jawa Timur, 2014). Sejumlah kalangan cenderung berpendapat bahwa salah satu penyebab utama masalah itu adalah adanya penurunan tingkat kepercayaan terhadap partai politik sebagai bentuk perlawanan terhadap perilaku korup para elite politik (Kompas, 2009). Merujuk pada hasil survei terbaru Indikator Politik Indonesia, partai politik hanya memperoleh kepercayaan publik sebesar 31 persen. Jika semestinya partai politik menjadi harapan bagi perubahan kehidupan berbangsa dan bernegara, partai politik kini justru lebih menjadi sumber masalah akibat perilaku korup sejumlah elite mereka.

Dalam rapat kerja dengan Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah, Februari 2013 Menteri Dalam Negeri menyatakan dari 524 daerah otonom, 290 kepala daerahnya sudah menjadi tersangka, terdakwa, dan terpidana. Mayoritas atau sekitar 86,2 persen kepala daerah yang tersangkut masalah hukum terlibat dalam kasus korupsi. Di lingkup legislatif juga tidak jauh berbeda. Dalam kurun 2004-2012, jumlah anggota DPRD provinsi yang dimintakan izin kepada Gubernur untuk diperiksa karena tersandung kasus hukum, khususnya korupsi, mencapai 431 orang. Jumlah itu belum termasuk anggota DPR dan DPRD kabupaten/kota. Politik uang merupakan bentuk lain dari perilaku korup para elite politik, terutama menjelang pelaksanaan pemilu. Politik uang merupakan praktek pemberian uang kepada para calon pemilih menjelang pelaksanaan pemilu, dengan harapan mereka akan memberikan dukungan suara kepada elite atau partai politik yang bersangkutan saat pemungutan suara nanti. Salah satu hal target paling potensial dari praktek politik uang adalah pemilih pemula.

Secara sederhana, pemilih pemula dapat diartikan sebagai kelompok yang berusia 17 tahun ke atas dan baru pertama kali menggunakan hak pilihnya dalam Pemilu 2014. Umumnya, mereka sedang menempuh pendidikan Sekolah Menengah Atas. Pendidikan politik kepada pemilih pemula, termasuk soal politik uang, penting dilakukan atas dasar dua hal. *Pertama*, pemilih pemula belum memiliki pengalaman memilih dalam pemilihan umum. Karena itu, mereka perlu mengetahui dan memahami berbagai hal terkait dengan pemilu, misalnya untuk apa pemilihan diselenggarakan, apa saja tahapan pemilu, siapa saja yang boleh ikut serta dalam pemilu, dan bagaimana tata cara menggunakan hak pilih dalam pemilu. *Kedua*, pemilih pemula merupakan kelompok dengan jumlah signifikan. Diperkirakan dalam setiap pemilihan umum, jumlah pemilih pemula mencapai 20-30 persen dari total jumlah pemilih dalam pemilu. Pada Pemilihan Umum 2004, secara nasional jumlah pemilih pemula mencapai 27 juta orang. Sedangkan pada Pemilu 2009, jumlah pemilih pemula sekitar 36 juta orang. Jumlah itu tentu terbilang cukup besar, sehingga dapat menentukan kemenangan partai politik atau kandidat tertentu peserta pemilu. Pendidikan politik bagi pemilih pemula akan membangun kesadaran lebih luas mengenai peran penting mereka dalam mereduksi praktek-praktek politik yang keliru menjelang Pemilu 2014. Pendidikan politik juga akan membawa manfaat untuk membuat pemilih pemula lebih mengerti soal pentingnya kelangsungan kehidupan demokrasi di Indonesia, sehingga kemudian diharapkan akan tumbuh dorongan dalam diri mereka untuk turut serta berpartisipasi dalam pemilu. Para pemilih pemula perlu mendapat pendidikan politik karena kehidupan politik di Indonesia saat ini masih menempatkan mereka sebagai obyek semata, termasuk target praktek politik uang. Mereka memerlukan pengetahuan mendalam mengenai hak mereka sebagai warga negara serta perlu dibantu memahami dan mencermati situasi serta kondisi politik pada level lokal maupun nasional.

Komisi Pemilihan Umum Jawa Timur, Senin 21 Oktober 2013, menetapkan total jumlah pemilih yang masuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan

Umum 2014 di Provinsi Jawa Timur sebanyak 30.545.935 orang. Jumlah ini berasal dari 38 kabupaten dan kota se Jawa Timur. "Kami telah melakukan pleno dan sudah menetapkan DPT," kata Komisioner KPU Jatim Agus Mahfud Fauzi di Surabaya. Sebanyak 30,5 Juta pemilih ini akan mengikuti pemilu tahun depan di 86.392 Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang tersebar di 8.501 desa dan kelurahan. Dari daftar itu, jumlah pemilih perempuan lebih banyak dibandingkan laki-laki. Rinciannya, 15.515.364 pemilih perempuan dan 15.030.571 pemilih laki-laki. (KPU Provinsi Jawa Timur, 2013).

Dalam UU Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD Nomor 18 mendefinisikan pemilih adalah Warga Negara Indonesia yang telah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih atau sudah atau pernah kawin. Dari sekian banyak potensi pemilih yang beraneka ragam pada Pemilu 2014, tak ada satupun partai politik peserta pemilu sampai saat ini yang secara khusus melirik keberadaan pemilih pemula padahal suaranya sangat potensial dalam Pemilu 2014.

Kelompok umur berusia 10-14 tahun 22.677.490 dan kelompok umur berusia 15-19 tahun 20.871.086. Jika diasumsikan kelompok umur 10-14 tahun separuh berusia 17 dan kelompok umur 15 -19 tahun semuanya menjadi pemilih, maka ada 32 juta jutaan potensi suara pemilih pemula pada Pemilu 2014. Dan suara potensial ini sangat signifikan guna memenangkan perhelatan pemilihan umum mendatang (BPS, 2013).

Pemilih pemula mayoritas memiliki rentang usia 17-21 tahun, kecuali karena telah menikah. Dan mayoritas pemilih pemula adalah pelajar (SMA), mahasiswa dan perkerja muda. Pemilih pemula merupakan pemilih yang sangat potensial dalam perolehan suara pada Pemilu. Suara potensial tersebut setidaknya bisa dilacak dari data dalam dua pemilu terakhir yakni pada Pemilu 2004 dan Pemilu 2009.

Pada Pemilu 2004, ada 50.054.460 juta pemilih pemula dari jumlah 147.219 juta jiwa pemilih dalam pemilu. Jumlah itu mencapai 34 persen dari

keseluruhan pemilih dalam pemilu. Jumlah tersebut lebih besar dari pada jumlah perolehan suara partai politik terbesar pada waktu itu, yaitu Partai Golkar yang memperoleh suara 24.461.104 (21,62 persen) dari suara sah. Sementara pada Pemilu 2009 lalu, potensi suara pemilih pemula tetap signifikan (KPU, 2010).

Besarnya pemilih pemula diperkirakan mencapai 19 persen atau 36 jutaan dari 189 juta penduduk yang memiliki hak pilih. Potensi suara pemilih pemula tersebut tetap lebih besar dibandingkan perolehan suara partai politik terbesar saat itu, yakni Partai Demokrat yang memperoleh 21.655.295 suara. Perolehan suara Partai Demokrat tersebut, jika dihitung berdasarkan suara yang sah dalam pemilu besarnya mencapai 20,81 persen (Bakti, 2012 dalam Rosit, 2013).

Pemilih pemula merupakan kelompok pemilih yang tidak boleh diabaikan. Bukan saja karena jumlahnya amat signifikan tetapi juga karena mereka memiliki afiliasi politik yang unik, yang berbeda dengan afiliasi politik pemilih yang sudah berkali-kali mengikuti pemilu.

Perkiraan jumlah pemilih pemula pada Pemilu 2014, cukup mencengangkan. Menurut data KPU, dari jumlah sekira 188 juta orang dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), diperkirakan terdapat sekira 22 juta orang yang akan mengikuti pemilu pertama kalinya. Sedangkan jumlah pemilih pada kelompok usia 17-23 tahun sekira 30 juta orang. Dan mayoritas pemilih pemula dan pemilih muda adalah pelajar (SMA), mahasiswa dan pekerja muda yang baru masuk kerja, sehingga totalnya sekira 52 juta orang.

Pada Pemilu 2004 lalu, ada sekira 50 juta orang pemilih pemula dari jumlah 147 juta orang pemilih. Jumlah itu mencapai 34 persen dari keseluruhan pemilih dalam pemilu. Penelitian yang dilakukan Bakti (2012) mencatat pemilih pemula mencapai 19 persen atau 36 jutaan dari 189 juta penduduk yang memiliki hak pilih. Potensi suara pemilih pemula tersebut tetap lebih besar dibandingkan perolehan suara partai politik terbesar saat itu, yakni Partai Demokrat yang memperoleh 21,6 juta suara.

Secara psikologis, para pemuda ini punya preferensi yang berbeda dengan orang-orang tua pada umumnya. Misalnya, mereka lebih kritis, mandiri, independen, anti-status quo atau tidakpuas dengan kemapanan, properubahan, dan historis dengan masa Orde Baru. Dari sosiokultural, para anak-anak muda ini juga hidup lepas dari pengaruh model demokrasi otoriter Orde Baru terbangun, tidak

pernah wajib nonton film G 30 S PKI, tidak pernah ikut Penataran P4, dan yang penting tak pernah mengalami “pemilu sinetron” yang pemenangnya sudah bisa ditebak (Rosit , 2013).

Para pemilih pemula pada pemilu 2014, mereka hidup sudah di alam demokrasi sehingga disebut sebagai *native democraton* alias lahir di alam demokrasi. Namun, sebagian dari mereka mereka juga dikenal menjadi kelompok pemilih yang cuek dengan keriuhan politik sekaligus tak tertarik politik. Karakteristik seperti di atas itu, seharusnya akan menjadi tantangan bagi siapapun untuk membangun kesadaran mereka untuk berpartisipasi menjadi komunitas pemilih cerdas. Pemilih yang memiliki pertimbangan rasional dalam menentukan pilihannya, sesuai dengan nurani karena tidak mudah digoda oleh jargon-jargon politik yang bergentayangan di media massa. Fakta lain soal pemilih ini, adalah rendahnya tingkat partisipasi mereka ke bilik suara. Dari dua pemilu sebelumnya, ternyata malah cenderung menurun. Pada tahun 1999 partisipasinya sebesar 92,7 persen. Tahun 2004 sebesar 84,07 persen, dan tahun 2009 sebesar 71 persen.

Nugroho dan Syarief (2012) dalam studinya mengenai “Media baru dan Proses Politik Kontemporer di Indonesia” mencatat terjadinya peran yang signifikan pengguna media sosial untuk perubahan sosial politik di Indonesia. Selanjutnya disebutkan, Indonesia adalah pengguna Facebook terbanyak nomor 5 di dunia, setelah Amerika Serikat, Brazil dan India. Jumlah akun twitter Indonesia mencapai 19,5 juta, juga nomor lima terbesar di dunia. Penggunaan media sosial yang tinggi itu, akan memperkuat masyarakat madani dan meningkatkan partisipasi politik sebagai bagian dari kekuatan sosial guna memperkuat demokrasi.

Setidaknya, ada tiga pola utama untuk membujuk pemilik pemula ini ke bilik suara. Pertama, adalah sosialisasi besar-besaran dengan medium baru yakni media sosial. Mark Poster (1990) dalam bukunya “The Second Media Age”

menyebutkan, adanya periode baru di mana teknologi interaktif dan komunikasi jaringan, khususnya dunia maya akan mengubah masyarakat.

Contoh paling dekat dari pendekatan komunikasi itu, adalah pada Pilkada DKI 2012 yang mengaplikasikan tim sukses Jokowi-Ahok dengan menggunakan sosial media (youtube) lewat parodi musik yang diubahnya menggunakan ikon bahasa anak muda. Sosial media memang bukan arus utama membentuk opini, namun jika menjadi mampu memancing kontroversi dan menjadi trending topic di sosial media, dipastikan akan mempengaruhi media mainstream untuk memberitakannya juga. Yang pada akhirnya, juga mempengaruhi masyarakat secara luas.

Sehingga tak heran, hampir semua parpol saat ini merekrut anak-anak muda yang getol berselancar di media sosial untuk ikut mendesain isu dan topik untuk dilempar ke media sosial. Kedua, parpol berupaya mempengaruhi teman sebaya atau peer group, juga dengan sosial media. Pengaruh teman sebaya atau sepermainan menjadi faktor yang patut dipertimbangkan, karena faktor eksternal ini bisa mempengaruhi informasi dan pendidikan politik. Teman sebaya dipercaya bisa mempengaruhi persepsi dan tindakan mereka untuk merespons isu politik.

Ketiga, peran pers untuk mencerdaskan sekaligus menggarap pemilih pemula yang besar ini juga harus sistematis, dengan metode terukur. Media massa yang mampu menangkap isu-isu anak-anak muda, merekam kebutuhan mereka, dan mengaplikasikan generasi digital ini, akan survive dan dipercaya oleh mereka. Upaya media massa utama menyalurkan informasi yang menggugah, terutama platform televisi dan platform internet, harus mampu menyajikan informasi politik kepada khalayaknya secara efektif dan efisien, tidak lagi bergantung kepada cara-cara tradisional dengan media arus utama biasa. Arus informasi bukan lagi didominasi oleh koran, radio, televisi, dan majalah.

Dalam hal ini, ketika sehari-hari para remaja atau pemilih pemula lebih banyak menghabiskan waktu berjam-jam di depan televisi dan gadgetnya, sudah kehilangan minat menonton dan membaca berita politik. Jurnalis didorong menuju konvergensi media.

Menurut August E. Grant dalam pengantar bukunya yang berjudul *Understanding Media Convergence; The State of the Field 2009*. Ada perubahan (change), yang terjadi dan tak bisa dielakkan. Semakin besar perubahan dan semakin jauh perubahan tersebut dari ekspektasi, maka menuntut ruang berita untuk selalu berinovasi. Selain dituntut untuk menyajikan berita yang lebih cepat, jurnalis juga dituntut untuk menghadirkan berita yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Perkawinan dini newsroom media televisi, radio, media cetak dengan media berbasis internet, tidak bisa dihindari. Ini adalah fakta yang tak dapat dipungkiri. Karena dengan perkawinan legal itu, akan memungkinkan informasi didapat dan disebarluaskan secara cepat tanpa sekat-sekat teknologi.

Mengapa kita perlu menekankan pentingnya kelompok usia 17-23 tahun untuk menentukan pilihannya pada Pemilu 2014? Tidak lain karena pada tahun 2045, atau 100 tahun Indonesia Merdeka, mereka masih dalam usia sangat produktif antara 48-54 tahun. Artinya mereka memiliki kesempatan untuk memberikan kontribusi besar bagi Indonesia. Di sinilah peran mencerdaskan kehidupan bangsa, masih relevan diterapkan oleh pers Indonesia. Demokrasi ini harus dikawal oleh pers, sesuai kapasitasnya, bahwa inilah langkah yang tepat untuk pers terlibat langsung dalam proses Pemilu 2014. Perlu strategi untuk peduli, karena anak muda adalah penentu bangsa. Pengamat Sosial dan Politik, DR Affan Sulaeman, mantan anggota KPU Provinsi Jawa Barat menyatakan, jumlah pemilih muda memiliki potensi memenangkan Pemilu Legislatif dan Presiden 2014.

Siapa pun partai politik yang mampu merangkul pemilih muda, maka sangat berpeluang besar menjadi pemenang pada pemilu 2014, Jjumlah pemilih muda berusia 17 sampai 29 tahun diperkirakan mencapai 53 juta pemilih dari 170 juta masyarakat Indonesia yang

terdaftar memiliki hak pilih. Pemilih muda yang berperan penting menentukan arah perubahan kemajuan Indonesia itu. Dengan jumlah perkiraan pemilih muda itu sudah jelas akan berpotensi memenangkan Pemilu, dan arah perubahan kemajuan Indonesia," kata itu (Affan dalam Republika, 2013).

Negara nampaknya perlu berusaha menggairahkan pemilih muda untuk berpolitik atau terlibat dalam setiap aktivitas politik sehingga dampaknya mau memberikan partisipasi politik setiap pesta demokrasi. Jangan sampai pemilih muda ini menjadi golput dan tidak mempergunakan hak pilihnya. Sementara itu kegiatan sosialisasi meningkatkan peran serta masyarakat dalam Pemilu Legislatif 2014 itu diselenggarakan oleh KPU Provinsi Jawa Timur maupun Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Jawa Timur. Kegiatan itu merupakan bagian dari tahapan persiapan Pemilu Legislatif 2014 untuk meningkatkan partisipasi masyarakat terutama pemilih pemula agar dapat menyalurkan hak suaranya.

Indonesia memasuki tahun politik pada 2014. Disebut tahun politik antara lain karena Indonesia akan melaksanakan sejumlah kegiatan politik yang melibatkan setidaknya rakyat berusia 17 tahun ke atas dan berujung pada pemilihan anggota legislatif (anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah/Senator dan DPRD) dan kabinet pemerintahan baru (Presiden, Wakil Presiden dan para Menteri). Di tahun 2014, Indonesia menggelar pesta demokrasi. Pada bulan April 2014 masyarakat Indonesia secara langsung memilih anggota DPR, DPRD, dan DPD. Sedangkan di bulan Juli 2014, masyarakat Indonesia memilih Presiden dan Wakil Presiden RI.

Dari data yang dirilis KPU, jumlah total pemilih yang telah terdaftar untuk pemilu tahun 2014 adalah sejumlah 186.612.255 orang penduduk Indonesia. Dari jumlah tersebut 20-30%-nya adalah Pemilih Pemula. Dalam pendidikan politik, kelompok muda yang baru pertama kali akan menggunakan hak pilihnya dalam Pemilu disebut dengan Pemilih Pemula. Pemilih Pemula ini terdiri dari mahasiswa dan siswa SMA yang akan menggunakan hak pilihnya pertama kali di tahun 2014.

Pada Pemilu 2004, jumlah Pemilih Pemula sekitar 27 juta dari 147 juta pemilih. Pada Pemilu 2009 sekitar 36 juta pemilih dari 171 juta pemilih. Data BPS 2010: Penduduk usia 15-19 tahun: 20.871.086 orang, usia 20-24 tahun: 19.878.417 orang. Dengan demikian, jumlah pemilih muda sebanyak 40.749.503 orang. Dalam pemilu, jumlah itu sangat besar dan bisa menentukan kemenangan partai politik atau kandidat tertentu yang berkompetisi dalam pemilihan umum (Kantor Berita Antara, 2014).

Secara psikologis, pemilih pemula memiliki karakteristik yang berbeda dengan orang-orang tua pada umumnya. Pemilih pemula cenderung kritis, mandiri, independen, anti status quo atau tidak puas dengan kemapanan, pro perubahan dan sebagainya. Karakteristik itu cukup kondusif untuk membangun komunitas pemilih cerdas dalam pemilu yakni pemilih yang memiliki pertimbangan rasional dalam menentukan pilihannya. Misalnya karena integritas tokoh yang dicalonkan, *track record*-nya atau program kerja yang ditawarkan.

Karena belum punya pengalaman memilih dalam pemilu, pemilih pemula perlu mengetahui dan memahami berbagai hal yang terkait dengan pemilu. Misalnya untuk apa pemilu diselenggarakan, apa saja tahapan pemilu, siapa saja yang boleh ikut serta dalam pemilu, bagaimana tata cara menggunakan hak pilih dalam pemilu dan sebagainya. Pertanyaan itu penting diajukan agar pemilih pemula menjadi pemilih cerdas dalam menentukan pilihan politiknya.

Dalam penghitungan suara pemilu, satu suara saja sangat berarti karena bisa mempengaruhi kemenangan politik. Apalagi suara yang berjumlah jutaan sebagaimana halnya yang dimiliki kalangan pemilih pemula. Itu sebabnya, dalam setiap pemilu, pemilih pemula menjadi “rebutan” berbagai kekuatan politik. Menjelang pemilu, partai politik atau peserta pemilu lainnya, biasanya membuat iklan atau propaganda politik yang menarik para pemilih pemula. Mereka juga membentuk komunitas kalangan muda dengan aneka kegiatan yang menarik anak-anak muda, khususnya pemilih pemula. Tujuannya agar para pemilih pemula tertarik dengan partai atau kandidat tersebut dan memberikan suaranya dalam pemilu untuk mereka sehingga mereka dapat mendulang suara yang signifikan dan meraih kemenangan.

Selain memiliki banyak kelebihan, pemilih pemula juga memiliki kekurangan, yakni belum memiliki pengalaman memilih dalam pemilu. Pemilu mendatang merupakan pengalaman pertama bagi pemilih pemula untuk menggunakan hak pilihnya. Karena belum punya pengalaman memilih dalam pemilu, pada umumnya banyak dari kalangan mereka yang belum mengetahui berbagai hal yang terkait dengan pemilihan umum. Mereka juga tidak tahu bahwa suaranya sangat berarti bagi proses politik di negaranya. Bahkan tidak jarang mereka enggan berpartisipasi dalam pemilu dan memilih ikut-ikutan tidak mau menggunakan hak pilihnya alias golongan putih (golput).

Temuan Lembaga Peduli Remaja (LPR) Kriya Mandiri Solo yang melakukan jajak pendapat pada pemilih pemula di Kota Solo tanggal 19 Februari 2009, menyatakan bahwa potensi golput pemilih pemula di Solo cukup tinggi. Dari 340 responden yang dipilih secara acak dari sepuluh SMA dan SMK di Solo, hanya 21,49% saja yang menyatakan siap memberikan suara. Sisanya 60,51% menyatakan belum yakin apakah akan memilih atau tidak, artinya berpotensi golput, dan 18% dengan tegas menyatakan tidak memilih.

Hasil survei juga menunjukkan 67,55% pemilih pemula belum mengetahui secara persis tahapan dan sistem pemilu. Tidak hanya itu, sebanyak 76,40% bahkan mengaku tidak tahu jumlah kontestan partai politik. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat ketertarikan pemilih pemula untuk berpartisipasi pada Pemilu 2009 lalu masih sangat rendah. Sikap ini terlihat dari 91,01% responden menyatakan tidak bersedia turut serta dalam kegiatan kampanye. Jumlah masyarakat yang memilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya pun selalu tinggi dalam setiap pemilihan umum (pemilu) maupun pemilihan kepala daerah (pilkada). Mereka merasa dengan bergantinya presiden atau anggota legislatif tidak berarti nasib mereka berganti.

Di satu sisi, ada sebagian masyarakat yang menggunakan hak pilihnya hanya berdasarkan pada calon yang memberi uang paling banyak. Para pendukung calon juga ada yang mudah terprovokasi sehingga mudah terjadi

konflik antar pendukung satu calon dengan pendukung calon lainnya. Konflik komunal, selain berakar dari fanatisme suku, daerah, agama, golongan, benturan kepentingan antar golongan, serta faktor ketidakadilan dalam penegak hukum, juga karena kedewasaan berpolitik yang masih rendah. Di sisi lain, ada sebagian masyarakat yang semakin kritis terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. Mereka tidak jarang melakukan demonstrasi untuk menyuarkan aspirasi. Namun sayang, demonstrasi sering berujung dengan konflik sehingga kontraproduktif dengan tujuan awal demonstrasi. Lalu bagaimana sebenarnya ketahanan politik Indonesia saat ini? Bagaimanakah kondisi ketahanan politik yang tangguh, dan bagaimana pula konsepsi serta strategi agar ketahanan politik Indonesia tangguh? (Matlap, 2013).

Oleh karena itu, penting bagi pemilih pemula mendapatkan pendidikan politik yang secara spesifik ditujukan bagi pemilih pemula. Dalam pendidikan pemilih pemula akan disampaikan arti penting suara pemilih pemula dalam pemilu, berbagai hal yang terkait dengan pemilu, seperti fungsi pemilu, sistem pemilu, tahapan pemilu, peserta pemilu, lembaga penyelenggara pemilu dan sebagainya. Tujuannya agar pemilih pemula memahami apa itu pemilu, mengapa perlu ikut pemilu dan bagaimana tatacara menggunakan hak pilih dalam pemilu. Setelah pemilih pemula memahami berbagai persoalan pemilu diharapkan pemilih pemula menjadi pemilih yang cerdas yakni pemilih yang sadar menggunakan hak pilihnya dan dapat memilih pemimpin yang berkualitas demi perbaikan masa depan bangsa dan negara.

Pendidikan politik saat ini disadari menjadi hal penting bagi kelangsungan demokrasi. Untuk itu, pemerintah pun menghimbau kepada partai politik mengalokasikan minimal 60% keuangan yang diterima dari pemerintah untuk pendidikan politik (UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik Pasal 34 Ayat 3a). Dalam rangka pendidikan politik pula Menteri Dalam Negeri menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2010 tentang Pedoman

Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Politik. Beberapa pokok pikiran yang tertuang dalam peraturan tersebut adalah :

Pasal 1

Pendidikan politik adalah proses pembelajaran dan pemahaman tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab setiap warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara (ayat 5).

Pasal 2

Pedoman fasilitasi penyelenggaraan pendidikan politik bertujuan untuk:

- a. memberikan arah kepada pemerintah daerah dalam memberikan fasilitasi penyelenggaraan pendidikan politik; dan
- b. memberikan kemudahan bagi partai politik, partai politik lokal, organisasi kemasyarakatan, lembaga nirlaba lainnya, dan lembaga atau instansi vertikal di daerah dalam mengakses jalur-jalur terkait penyelenggaraan pendidikan politik di daerah.

Pasal 3

Sasaran fasilitasi penyelenggaraan pendidikan politik untuk:

- a. meningkatnya kesadaran hak dan kewajiban masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
- b. meningkatnya kemandirian, kedewasaan, dan pencapaian prestasi dalam penyelenggaraan kehidupan politik dan kenegaraan; dan
- c. berkembangnya karakter bangsa yang selaras dengan budaya dan sejarah bangsa.

Pasal 7

Kelompok sasaran fasilitasi penyelenggaraan pendidikan politik meliputi:

- a. partai politik;
- b. partai politik lokal;
- c. organisasi kemasyarakatan;
- d. lembaga nirlaba lainnya; dan
- e. lembaga atau instansi vertikal di daerah.

Berangkat dari latar belakang sebagaimana diuraikan di depan maka dipandang perlu melakukan penelitian dengan tema : **“Kajian Tentang Pendidikan Politik Bagi Pemilih Pemula Dalam Upaya Peningkatan Partisipasi Publik di Jawa Timur”**.

1.2. Rumusan Masalah

Penelitian ini difokuskan untuk menjawab sejumlah pertanyaan penelitian atau permasalahan penelitian, meliputi :

1. Bagaimanakah pemahaman para pemilih pemula terhadap informasi/ pengetahuan yang semestinya menjadi materi pendidikan politik?;
2. Informasi/pengetahuan manakah yang dapat membentuk kesadaran para pemilih pemula akan pentingnya partisipasi politik?;
3. Bagaimanakah cara atau metode yang membuat para pemilih pemula mendapatkan pemahaman tentang materi pendidikan politik ?;
4. Bagaimanakah kesadaran para pemilih pemula terhadap partisipasi politik ?;
5. Bagaimanakah model pelaksanaan pendidikan politik di Jawa Timur, sebagai implementasi dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2010 tentang Pedoman Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Politik?, meliputi :
 - a. Pelaksana pendidikan politik
 - b. Metoda pendidikan politik
 - c. Materi pendidikan politik
 - d. Peserta atau target sasaran pendidikan politik
 - e. Narasumber/Pemateri
 - f. Sarana dan prasarana untuk mendukung pendidikan politik
 - g. Jangka waktu pendidikan politik.
6. Bagaimanakah model pendidikan politik yang perlu diterapkan di Provinsi Jawa Timur, dalam upaya meningkatkan partisipasi politik pemilih pemula?.

1.3. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan permasalahan sebagaimana tersebut di atas, penelitian ini bertujuan untuk :

1. Mengetahui tingkat pemahaman pemilih pemula terhadap informasi/ pengetahuan yang semestinya menjadi materi pendidikan politik

2. Mengetahui informasi/pengetahuan manakah yang dapat membentuk kesadaran para pemilih pemula akan pentingnya partisipasi politik
3. Mengetahui cara atau metode yang telah membuat para pemilih pemula mendapatkan pemahaman tentang materi pendidikan politik
4. Mengetahui kesadaran para pemilih pemula terhadap partisipasi politik.
5. Mengetahui pelaksanaan pendidikan politik di Jawa Timur, sebagai implementasi dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2010 tentang Pedoman Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Politik, meliputi :
 - a. Pelaksana pendidikan politik
 - b. Metoda pendidikan politik
 - c. Materi pendidikan politik
 - d. Peserta atau target sasaran pendidikan politik
 - e. Narasumber/Pemateri
 - f. Sarana dan prasarana untuk mendukung pendidikan politik
 - g. Jangka waktu dan frekuensi pendidikan politik.
6. Merumuskan pokok-pokok pikiran yang berkaitan dengan pelaksanaan pendidikan politik di Provinsi Jawa Timur, dalam upaya meningkatkan partisipasi politik pemilih pemula.

1.4. Hasil yang Diharapkan

Penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan produk dokumen laporan yang di dalamnya berisi data dan hasil analisis data yang terfokus pada upaya menjawab pertanyaan penelitian (*research question*) sebagaimana tertuang dalam sub bab Rumusan Permasalahan Penelitian. Jadi hasil penelitian ini memuat : (1) data tentang tingkat pemahaman pemilih pemula terhadap informasi/pengetahuan yang menjadi materi pendidikan politik; (2) data tentang informasi/pengetahuan yang dapat membentuk kesadaran para pemilih pemula akan pentingnya partisipasi politik; (3) data tentang cara atau metode pendidikan

politik yang membuat para pemilih pemula mendapatkan pemahaman tentang materi pendidikan politik; (4) data tentang tingkat kesadaran para pemilih pemula terhadap partisipasi politik; (5) data tentang pelaksanaan pendidikan politik di Jawa Timur, sebagai implementasi dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2010, meliputi : pelaksana pendidikan politik, metoda pendidikan politik, materi pendidikan politik, peserta atau target sasaran pendidikan politik, narasumber/pemateri, sarana dan prasarana untuk mendukung pendidikan politik, jangka waktu pendidikan politik; (6) pokok-pokok pikiran yang berkaitan dengan pelaksanaan pendidikan politik di Provinsi Jawa Timur, dalam upaya meningkatkan partisipasi politik pemilih pemula.

1.5. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup dari penelitian dengan tema “Kajian Tentang Pendidikan Politik Bagi Pemilih Pemula Dalam Upaya Peningkatan Partisipasi Publik di Jawa Timur” ini, meliputi :

1. Pengumpulan data, identifikasi data dan analisis data primer tentang : tingkat pemahaman pemilih pemula terhadap materi pendidikan politik, informasi/pengetahuan yang dapat membentuk kesadaran para pemilih pemula akan pentingnya partisipasi politik, tingkat kesadaran para pemilih pemula terhadap partisipasi politik
2. Pengumpulan data, identifikasi data dan analisis data empirik (data primer dan data sekunder) guna mengetahui pelaksanaan pendidikan politik di Jawa Timur, sebagai implementasi dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2010 tentang Pedoman Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Politik, meliputi : pelaksana pendidikan politik, metoda pendidikan politik, materi pendidikan politik, peserta atau target sasaran pendidikan politik, narasumber/Pemateri, sarana dan prasarana untuk mendukung pendidikan politik, jangka waktu pendidikan politik

3. Menyusun pokok-pokok pikiran yang berkaitan dengan pelaksanaan pendidikan politik yang perlu diterapkan di Provinsi Jawa Timur, dalam upaya meningkatkan partisipasi politik pemilih pemula.